

Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap

Income Inequality and Middle Income Trap

Tri Wibowo^{α*}

* Email: 3wibowo@gmail.com

^α Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal,
Jl Dr Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Riwayat artikel:

- Diterima 19 Mei 2016
- Direvisi 20 Juni 2016
- Disetujui 28 Juni 2016

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, inequality, Middle Income Trap

Klasifikasi JEL: D63, E24, E62

Abstract

Inequality is a problem that is more complex than poverty. High inequality will gradually become an obstacle to economic growth. Constraints to economic growth, resulting a country get stuck in a middle-class income group or often called as Middle Income Trap. This article wants to know the description as well as the position of Indonesia in the group of Middle Income countries. The method of analysis used is descriptive method in graphic form, as well as a simple mathematical calculation. The results of the analysis showed that for two decades income inequality in Indonesia has increased. In 1990, amounting to 20 percent of Indonesia's richest (quintile 5) controls 39 percent of the total expenditure of the entire population. In 2010, the inequality widened since 44 percent of total expenditures come from 20 percent of the richest people in Indonesia. Nonetheless, Indonesia relatively has a good position compared with countries that are in the Lower Middle Income group. With Cartesian quadrant, Indonesia is in the group of countries with criteria of high GNI per capita and low inequality.

Abstrak

Ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibanding dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan suatu negara tidak mampu keluar atau terjebak dalam kelompok pendapatan kelas menengah. Artikel ini ingin mengetahui gambaran serta posisi Indonesia dalam kelompok negara *Middle Income*. Metode analisis digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk grafis, serta penghitungan matematis sederhana. Dari hasil analisis diperoleh bahwa selama dua dasawarsa ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 1990, sebesar 20 persen penduduk terkaya Indonesia (kuintil 5) menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk. Pada tahun 2010, naik menjadi 44 persen atau sebesar 44 persen total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia. Meskipun demikian, posisi Indonesia relatif cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelompok *Lower Middle Income*. Dengan kuadran kartesius, Indonesia berada pada kelompok negara dengan kriteria GNI per kapita tinggi dan ketimpangan yang rendah.

1. PENDAHULUAN

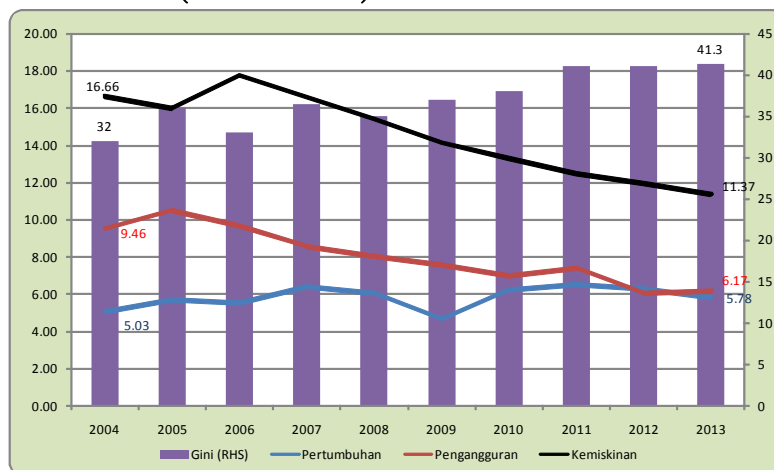
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, arah pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan melalui tiga strategi yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan. Pada RPJMN 2010-2014, arah strategi pembangunan ditambahkan *pro environment* dimana program pembangunan berorientasi pada kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. (RPJM, 2010-2014).

Strategi pembangunan *progrowth*, *pro job*, dan *pro poor*, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selama kurun waktu 2004 – 2013, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, demikian pula tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, baik dari jumlah orang miskin maupun tingkat kemiskinannya. Pada tahun 2004, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen, menjadi 5,78 persen pada tahun 2013. Pada periode yang sama, kemiskinan turun dari 16,66 persen menjadi 11,37 persen. Demikian pula tingkat pengangguran, dari 9,46 persen pada tahun 2004, menjadi 6,17 pada tahun 2013.

Ditengah suksesnya kinerja pemerintah dalam menjalankan strategi pembangunan tersebut, terdapat kritik bahwa suksesnya pembangunan tersebut tidak dinikmati secara merata. Ketimpangan dari tahun ke tahun semakin melebar. Golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam “menikmati kue” suksesnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketimpangan pada tahun 2004 sebesar 32 persen, semakin terus melebar. Pada tahun 2013, ketimpangan Indonesia telah mencapai 41,3 persen.

GAMBAR-1. Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan dan Ketimpangan (dalam Persen)



Sumber : BPS

Namun demikian, kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia, Negara kawasan Asia juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Indonesia dengan penduduk hampir mencapai 250 juta, merupakan Negara kepulauan, dan sedang mengalami masa peralihan ke dalam kelompok negara *middle income*, mempunyai permasalahan yang lebih kompleks. Sharma

(dalam Tri Wibowo, 2013) menyatakan bahwa di negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan namun terjadi ketimpangan yang semakin lebar. Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan telah mengalami peningkatan. Ketimpangan di China sebesar 48,2 persen, Filipina sebesar 45 persen dan Thailand sebesar 40 persen.

Amerika Serikat sebagai negara maju dengan banyak pakar ekonomi, juga mengalami permasalahan yang sama. Kemajuan teknologi dan globalisasi tidak mampu mengatasi adanya ketimpangan, justru memberikan andil semakin melebarnya jurang Si Kaya dan Si Miskin. Bahagijo, dkk (2014) menyatakan bahwa di AS berkumpul Miliarwan dan Superkaya dunia, namun seperempat penduduk, kelompok pendapatan terendah tidak mengalami peningkatan pendapatan sejak 25 tahun terakhir. Sebaliknya kalangan 1% terkaya justru meningkat tiga kali, dan meraup 20% kekayaan nasional. Kemajuan teknologi dan globalisasi (relokasi industri untuk mencari biaya tenaga murah dan lokasi industri yang murah) ikut menyumbang ketimpangan. Dulu di tahun 1979, pabrikan mobil General Motors memiliki 850 ribu pekerja. Sekarang, Microsoft memiliki 100 ribu pekerja saja diseluruh dunia. Google memiliki 50 ribu dan Facebook lima ribu pekerja.

1.2. Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran ketimpangan pendapatan pada negara-negara *Middle Income*
2. Mengetahui posisi ketimpangan pendapatan Indonesia dalam kelompok negara-negara *Middle Income*

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketimpangan Pendapatan

Dalam menuju suatu pembangunan jangka panjang agar terlepas dari *Middle Income Trap*, perhatian lebih sering terfokus pada pertumbuhan. Agar pertumbuhan ekonomi kokoh dalam jangka panjang, pembangunan harus bersifat inklusif, berkualitas, dengan kesetaraan semua pelaku pembangunan. Salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya.

ADB (2012) melaporkan bahwa ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat, merupakan faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial, rapuhnya ikatan kebersamaan, pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah karena masyarakat telah menjadi apatis. Kondisi ini akan berdampak buruk pada proses pembangunan. Jika tidak ada upaya perbaikan kebijakan, akan menjadi suatu "lingkaran setan". Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan; dan ketimpangan yang tinggi akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka semakin jauh harapan untuk menjadi negara yang mampu keluar dari suatu jebakan negara kelas menengah atau sering disebut *Middle Income Trap (MIT)*.

World Economic Forum (WEF, 2014) telah menempatkan ketimpangan sebagai risiko global yang harus diwaspadai. Dalam laporan tersebut, WEF telah menempatkan disparitas pendapatan yang parah (*severe income disparity*) menempati peringkat 4 dari 10 risiko global yang menempati prioritas tinggi pada tahun 2014. Disparitas pendapatan yang parah akan menyebabkan gangguan stabilitas sosial dan politik, yang selanjutnya

akan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik. Gangguan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, akan merembet ke krisis fiskal. Berbagai gangguan ini akan menyebabkan tekanan pada pasar tenaga kerja, mengakibatkan turunnya pendapatan, dan semakin memperparah ketimpangan.

Negara-negara maju yang telah lolos dari MIT, mulai khawatir akan semakin meningkatnya ketimpangan. Seperti disampaikan Bahagijo, dkk (2012) pada Desember 2013, dalam sebuah pidato Presiden Obama menyatakan bahwa mengatasi ketimpangan merupakan “tantangan utama” dan dia akan sungguh-sungguh memfokuskan diri untuk persoalan ini. Obama menguraikan bukti-bukti mengapa permasalahan ini penting. “Kelompok 10 persen tidak saja telah memperoleh sepertiga dari pendapatan kita, kini mereka meraup separuh. Di masa lalu, rata-rata CEO menerima 20 sampai 30 kali lipat (dibanding) pendapatan rata-rata pekerja, kini mereka menerima 273 kalinya. Dan, para keluarga dari kelompok 1 persen terkaya, memiliki kekayaan 288 kali ketimbang pendapatan rata-rata keluarga di AS”

Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin. Cara mengukur ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan mengurutkan populasi dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran (atau pendapatan). Kemudian dikelompokkan dalam 5 kelompok (kuintil) atau 10 kelompok, dihitung prosentase masing-masing kelompok terhadap total pengeluaran. Dengan 5 kelompok (kuintil) biasanya kelompok termiskin berada 6 – 10 persen dari total pengeluaran, sementara kelompok terkaya berkisar 35 – 50 persen (Haughton, 2009).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini diatas 0,5.

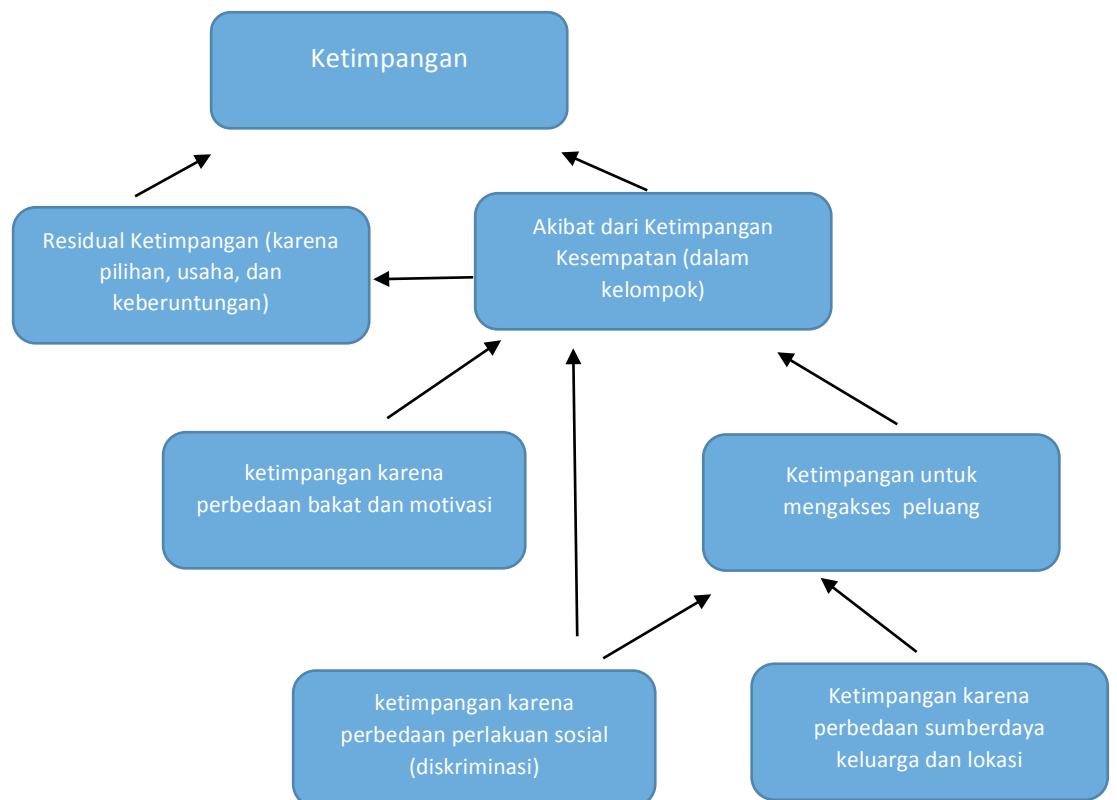
Sementara itu (ADB, 2012) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang umumnya menggunakan ukuran Gini ratio, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita. Dua pendekatan ini memberikan hasil yang berbeda. Ketimpangan dengan pendekatan pendapatan biasanya akan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan pengeluaran. Pada kebanyakan negara-negara berkembang di Asia, ketimpangan pada umumnya menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pengecualian untuk Malaysia dan Taipei, China yang menggunakan pendekatan pendapatan. Demikian juga untuk negara-negara di Afrika Sub-Sahara juga digunakan pendekatan pengeluaran. Sedangkan untuk negara-negara Amerika Latin dan OECD digunakan pendekatan pendapatan. Perbedaan pendekatan penghitungan ini ditentukan oleh ketersediaan data. Data pendapatan pada umumnya lebih sulit diperoleh, dibanding dengan data pengeluaran. Gini ratio di Filipina pada tahun 2009 dengan pendekatan pendapatan sebesar 47 persen, sedangkan dengan pendekatan pengeluaran hanya sebesar 43 persen. Di Vietnam pada tahun 2008 memberikan hasil yang lebih mencolok. Gini ratio dari pendekatan ukuran pendapatan diperoleh nilai sebesar 46 persen, sedangkan dengan pengeluaran hanya sebesar 37 persen.

2.2. Ketimpangan Kesempatan

Ketimpangan mempunyai banyak konsep yang berbeda. Selain ketimpangan pendapatan, terdapat konsep lain ketimpangan dengan ukuran non-pendapatan. Ketimpangan non-pendapatan, seperti kesenjangan pendidikan dan kesehatan, lebih multidimensi dibandingkan dengan ketimpangan dengan ukuran pendapatan. Ketimpangan pendapatan berorientasi pada hasil akhir (*outcome*), sedangkan ketimpangan non-pendapatan berorientasi pada proses untuk mencapai hasil akhir. Ketimpangan non-pendapatan sering disebut sebagai ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*).

Ketimpangan kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan, pada akhirnya akan menyebabkan kendala dalam masuk pasar kerja, sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Disisi lain adanya ketimpangan pendapatan, misalnya rendahnya pendapatan seorang kepala keluarga, akan mengakibatkan anak menjadi susah menikmati pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya ketimpangan dalam kesempatan. Barros, et al (2009) mendekomposisi ketimpangan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

GAMBAR-2. Dekomposisi Ketimpangan



Disarikan dari: Barros, et al, 2009

Kotak paling atas merupakan ketimpangan diamati pada hasil seperti penghasilan tenaga kerja, konsumsi rumah tangga per kapita, prestasi pendidikan, kesehatan, atau hasil indikator sosial lainnya. Ketimpangan hasil muncul akibat dari dua sumber utama. Faktor utama adalah

ketimpangan terkait dengan perbedaan individu sehingga tidak dapat mengakses kesempatan seperti: ras, jenis kelamin, status keluarga dan kondisi sosial serta tempat di mana mereka lahir, serta cacat mental atau fisik yang diwarisi sejak lahir. Komponen ketimpangan yang lainnya (residual) adalah akibat dari usaha seseorang secara sengaja memilih jalan berbeda atau karena keberuntungan.

Disampaikan oleh Alisjahbana (2012), bahwa problema ketimpangan pendapatan masyarakat merupakan suatu permasalahan jangka panjang, sehingga untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang pula. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan meningkatnya kualitas SDM, kesempatan untuk memasuki pasar kerja semakin meningkat sehingga mampu memiliki penghasilan lebih layak.

Sementara itu, ADB (2012) menyampaikan bahwa kekuatan pasar yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk ketidaksetaraan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi tidak proporsional akan menguntungkan kelompok penduduk kaya dan yang berpendidikan lebih baik, yang lebih nyaman dengan teknologi baru. Demikian juga era globalisasi dengan meningkatnya arus perdagangan. Solusinya adalah bukan dengan mengerem kekuatan pasar pro-pertumbuhan, tetapi dengan kebijakan yang membuat kesetaraan untuk setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah metode diskriptif eksploratif. Metode diskriptif eksploratif digunakan untuk mendapat gambaran bagaimana ketimpangan pendapatan pada kelompok negara-negara *Middle Income* serta dimana posisi Indonesia pada kelompok tersebut. Analisis tren digunakan untuk melihat arah keterkaitan antar variabel.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

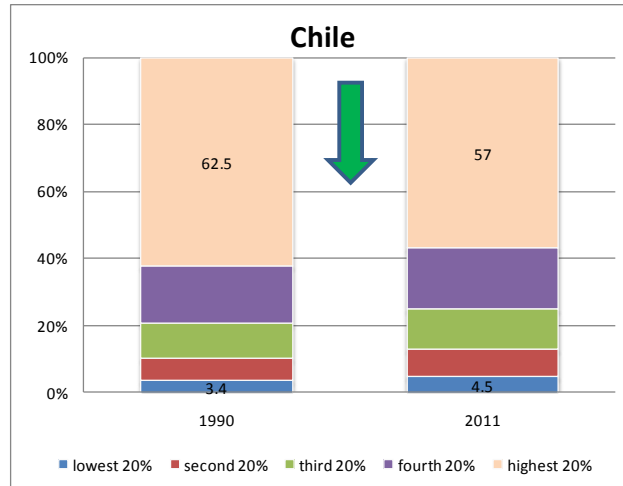
4.1. Distribusi Pengeluaran, Ketimpangan dan Pendapatan Per Kapita

Dilihat dari porsi pengeluaran kelompok masyarakat termiskin (20 persen terbawah, kuintil 1) dan kelompok masyarakat terkaya (20 persen teratas, kuintil 5), pada masing-masing negara sebagai sampel baik yang sukses maupun yang gagal dalam melewati MIT, memberikan hasil yang beragam. Komposisi masing-masing kelompok pengeluaran, Gini ratio serta pendapatan per kapita (GNI Atlas methodology dalam US\$) adalah sebagai berikut :

- a) **Chile.** Sebagai negara yang sukses melewati MIT, ternyata komposisi pengeluarannya didominasi oleh kelompok terkaya. Pada tahun 1990, kelompok orang terkaya (kuintil 5) mempunyai porsi 62,5 persen dari total pengeluaran seluruh penduduk. Sementara itu kelompok orang miskin (kuintil 1) hanya sebesar 3,4 persen, atau dengan ratio kaya-miskin sebesar 18,4. Pendapatan per kapita Chile pada tahun 1990 sebesar US\$ 2243. Pada tahun 2011, Chile berhasil menurunkan porsi kelompok terkaya menjadi 57 persen, dan kelompok termiskin meningkat menjadi 4,5 persen sehingga ratio kaya-miskin turun menjadi 12,7. Pendapatan per kapita Chile pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar US\$ 15227. Dengan pendapatan perkapita ini Chile telah masuk dalam negara

berpendapatan tinggi (*high income*). Rata-rata pertumbuhan tahunan per kapita Chile mencapai 9,0 persen.

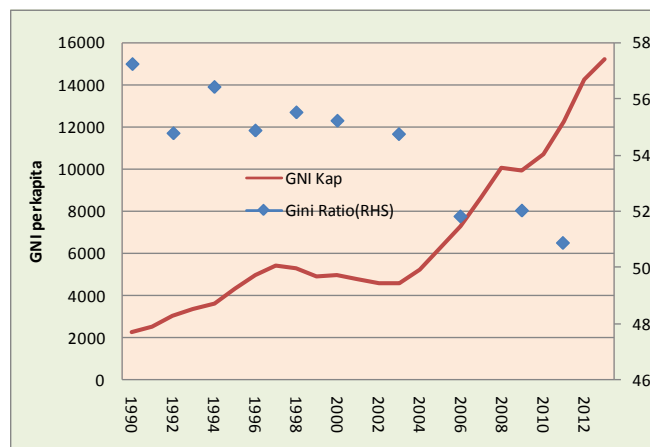
GAMBAR-3. Distribusi Pengeluaran Penduduk Chile Tahun 1990 dan 2011 (Persen)



Sumber : World Development Indicator (WDI)

Salah satu faktor kunci sukses Chile dalam keluar dari MIT adalah suksesnya mengelola ketimpangan. Sejak tahun 2000, ketimpangan (dengan ukuran Gini ratio) Chile menunjukkan penurunan. Dengan adanya pemerataan, pertumbuhan ekonomi Chile menjadi kokoh dan GNI per kapita sejak tahun 2003 menunjukkan peningkatan tajam. GNI perkapita Chile pada tahun 2003 sebesar US\$ 4,5 ribu, pada tahun 2013 menjadi US\$ 15 ribu, atau meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam tempo 10 tahun.

GAMBAR-4. Ketimpangan dan GNI per Kapita (US\$) Chile 1990-2013

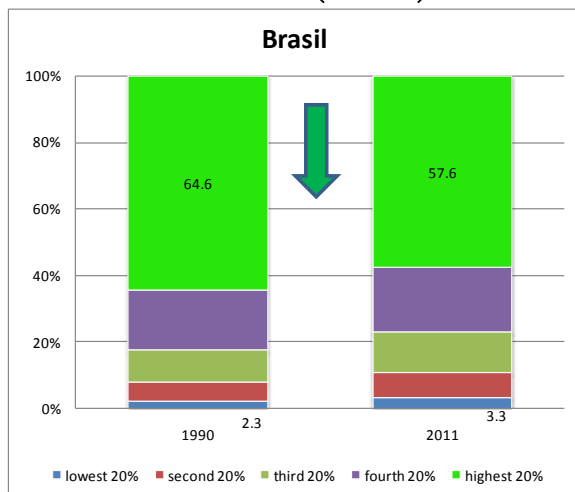


Sumber : WDI

- b) **Brasil.** Komposisi total pengeluaran penduduk Brasil pada tahun 1990 didominasi oleh kelompok terkaya hingga mencapai 64,6 persen. Sementara itu, kelompok termiskin hanya mempunyai porsi sebesar 2,3 persen, atau dengan ratio kaya-miskin sebesar 28,1. Pada tahun 2011, komposisi terkaya 57,6 persen, dan termiskin 3,3 persen. Ratio kaya-miskin turun menjadi 17,5. Dari sisi pendapatan,

pada tahun 1990 pendapatan per kapita penduduk Brasil sebesar US\$ 2698, naik menjadi US\$ 11691 ada tahun 2013, atau hanya mampu tumbuh rata-rata per tahun sebesar 7 persen. Pada tahun 1989 sampai dengan 2001, Brasil telah masuk kelompok negara *Upper Middle Income (UMI)*. Namun tahun 2002 – 2005, Brasil kembali ke kelompok negara *Lower Middle Income (LMI)*. Mulai tahun 2006 Brasil kembali masuk dalam kelompok negara UMI. Dengan kondisi ini, Brasil termasuk negara yang belum mampu lepas dari MIT.

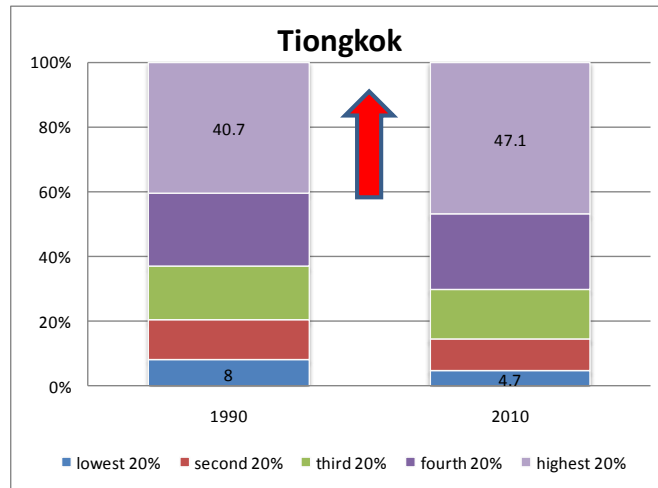
GAMBAR-5. Distribusi Pengeluaran Penduduk Brasil Tahun 1990 dan 2011 (Persen)



Sumber : WDI

- c) **China.** Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, permasalahan China untuk lepas dari MIT begitu kompleks. Walaupun dari sisi pendapatan per kapita penduduk China mampu meningkat rata-rata per tahun meningkat sebesar 14 persen (dari US\$ 333.5 pada tahun 1990, menjadi US\$ 6560 pada tahun 2013), namun ketimpangan semakin melebar. Komposisi total pengeluaran penduduk terkaya (40,7 persen) dibanding termiskin (8 persen) pada tahun 1990, dengan ratio sebesar 5,1. Pada tahun 2010, porsi penduduk terkaya dalam total pengeluaran menjadi 47,1 persen dan penduduk termiskin justru mengalami penurunan menjadi sebesar 4,7 persen. Ratio terkaya-termiskin naik menjadi 10 persen. Walaupun mempunyai pertumbuhan per kapita yang tinggi, namun pertumbuhan secara keseluruhan lebih dinikmati oleh orang kaya, ketimpangan menjadi semakin lebar. Meskipun demikian, pada tahun 2010 China mulai memasuki kelompok negara *Upper Middle Income*.

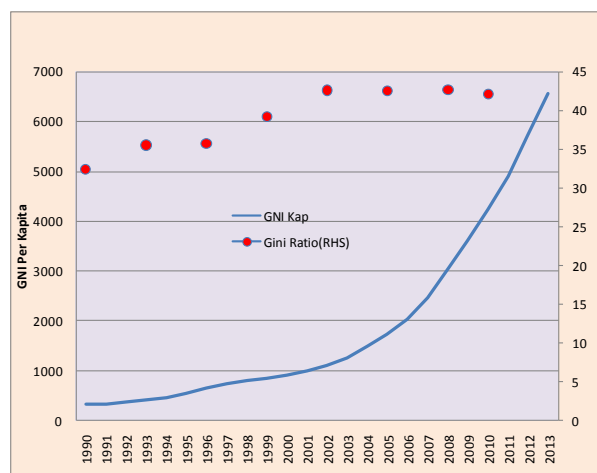
GAMBAR-6. Distribusi Pengeluaran Penduduk China Tahun 1990 dan 2010 (Persen)



Sumber : WDI

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,37 miliar, China menghadapi masalah yang cukup serius terkait ketimpangan. Walaupun GNI perkapita selama tahun 2000 sampai dengan 2013 telah mengalami kenaikan lebih dari 7 kali lipat, namun ketimpangan juga mengalami peningkatan. Dengan ukuran Gini ratio, ketimpangan pada tahun 1990 sebesar 32 persen, naik menjadi 42 persen pada tahun 2010. Dengan kondisi ini China masih lama untuk bisa keluar dari MIT.

GAMBAR-7. Ketimpangan dan GNI per Kapita (US\$) China 1990 - 2013

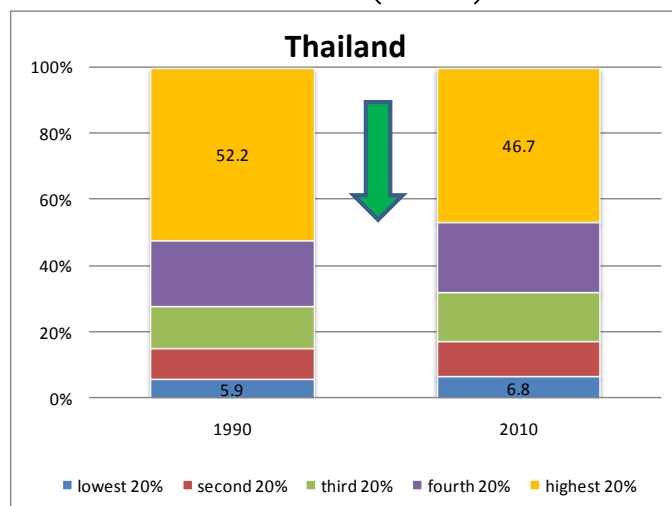


Sumber : WDI

- d) **Thailand.** Salah satu negara di kawasan ASEAN yang cukup berhasil menurunkan kelompok penduduk terkaya dalam komposisi pengeluaran nasional, dari 52,2 persen pada tahun 1990, menjadi 46,7 persen pada tahun 2010. Porsi penduduk termiskin dalam periode yang sama naik dari 5,9 persen menjadi 6,8 persen. Dengan kondisi ini, ratio penduduk terkaya – termiskin turun dari 8,85 menjadi 6,87. GNI per kapita penduduk Thailand pada tahun 1990 sebesar \$

1489, naik menjadi \$ 5371 pada tahun 2013, atau mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6 persen. Seperti yang dialami China, Thailand pada tahun 2010 mulai memasuki kelompok negara *Upper Middle Income*.

GAMBAR-8. Distribusi Pengeluaran Penduduk Thailand Tahun 1990 dan 2011 (Persen)



Sumber : WDI

Negara-negara diatas adalah contoh negara yang lolos dari MIT (Chile) dan negara-negara yang sedang berada dalam kelompok *Upper Middle Income* (Brasil, China, Thailand). Lebih rinci, perkembangan GNI per kapita (Atlas metode) masing-masing negara disajikan dalam Tabel-1.

TABEL-1. Pendapatan Per Kapita (Atlas Metode, dalam US\$) dan Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan

NEGARA	1990	2013	PERTUMBUHAN	KELOMPOK NEGARA
CHILE	2243.3	15227.0	9%	<i>High Income</i>
BRASIL	2698.8	11691.6	7%	<i>Upper Middle</i>
CHINA	333.5	6560.7	14%	<i>Upper Middle</i>
THAILAND	1489.3	5371.4	6%	<i>Upper Middle</i>

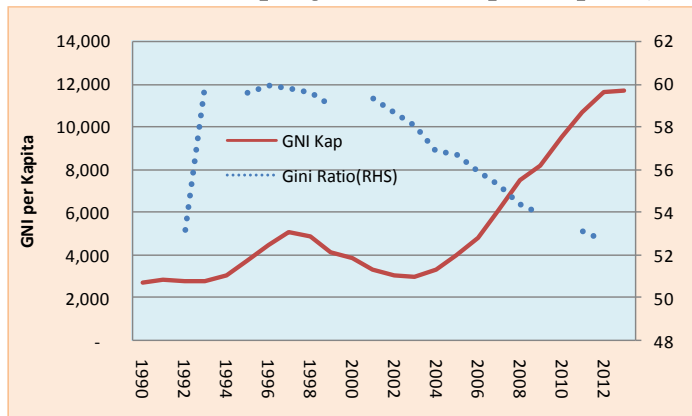
Sumber : Worldbank[†]

Dari ketiga negara tersebut, Brasil yang mempunyai potensi untuk segera lolos dari jebakan MIT. Namun untuk lolos dari jebakan MIT dan masuk menjadi negara *High Income* ternyata tidak mudah. Brasiltelah 25 tahun menjalani “kutukan” agar dapat keluar dari jebakan. Ketimpangan yang tinggi ternyata menjadi kendali penghambat laju pertumbuhan ekonomi Brasil. Brasil rupanya belajar dari pengalaman. Ketimpangan (dengan ukuran Gini ratio) Brasil setelah tahun 2000 selalu menunjukkan penurunan. Hal ini membawa dampak positif bagi perekonomian Brasil. Mulai tahun 2003, GNI per kapita Brasil terus mengalami peningkatan cukup tajam. Dengan pertumbuhan GNI perkapita

[†] Threshold pengelompokan pendapatan per kapita (Atlas Metode, World Bank) negara pada tahun 2013 : (low income <= 1,045 US\$), (lower middle 1,046-4,125 US\$), (upper middle 4,126-12,745 US\$), (high income > 12,745 US\$)

mencapai 7 persen, diperkirakan tahun 2015 Brasil GNI per kapita Brasil telah melewati US\$ 13,000. Dengan angka GNI per kapita tersebut, Brasil telah masuk dalam kelompok negara *High Income*, dan lolos dari MIT.

GAMBAR-9. Ketimpangan dan GNI per Kapita (US\$) Brasil (1990 - 2013)



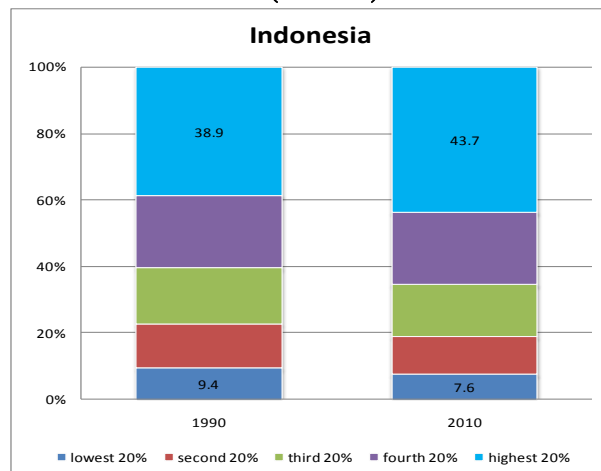
Sumber : WDI

4.2. Ketimpangan di Indonesia

Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa dengan porsi sebesar 3,55 persen dari total penduduk dunia; mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Negara yang terdiri dari ribuan pulau, sistem politik yang multi partai, desentralisasi, pasar tenaga kerja yang didominasi lulusan SLTA, kualitas infrastruktur, sistem perpajakan dan begitu banyak faktor yang bisa diidentifikasi sebagai penghambat untuk lolos dalam jebakan MIT. Salah satu faktor yang tidak kalah penting bagi Indonesia untuk keluar dari MIT adalah masalah ketimpangan.

Porsi kelompok penduduk terkaya Indonesia pada tahun 1990 mencapai 38,9 persen dalam total pengeluaran nasional, naik menjadi 43,7 persen pada tahun 2010. Porsi penduduk termiskin dalam periode yang sama mengalami penurunan dari 9,4 persen menjadi 7,6 persen. Dengan kondisi ini, ratio penduduk terkaya – termiskin Indonesia yang pada tahun 1990 hanya sebesar 4,14, naik menjadi 5,75 pada tahun 2010. Kelompok orang kaya Indonesia semakin mendapat lebih banyak manfaat dalam perekonomian.

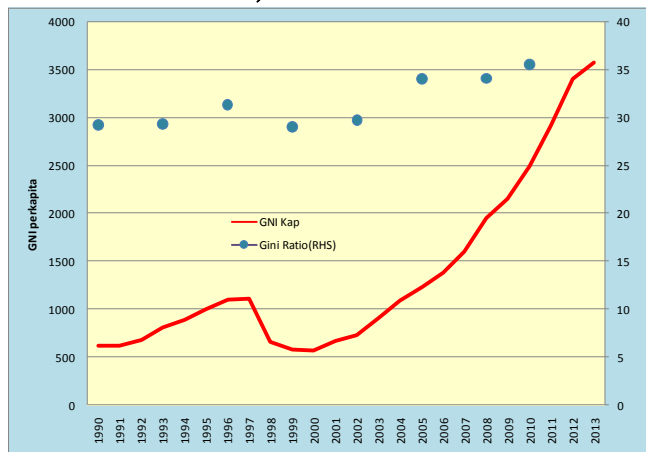
GAMBAR-10. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 1990 dan 2010 (Persen)



Sumber : WDI

Disisi lain, ketimpangan di Indonesia dengan ukuran Gini ratio dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Pada tahun 1990, ketimpangan di Indonesia mencapai 29,2 persen, naik menjadi 35,5 persen pada tahun 2010. Sementara itu, GNI per kapita Indonesia pada tahun 1990 sebesar US\$ 621, naik menjadi US\$ 3582 pada tahun 2013, atau mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 8 persen. Dengan kondisi tersebut diatas, yang mendesak untuk dijawab agar bisa lepas dari MIT bukan berapa tingkat pertumbuhan yang harus dicapai dan waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari kelompok *Middle Income*, tetapi bagaimana menurunkan tingkat ketimpangan yang trennya terus mengalami peningkatan. Sasaran juga perlu diturunkan sehingga lebih bersifat jangka pendek. Dari sasaran awal lolos *Middle Income* dan menuju ke *High Income* dengan jangka waktu serta target yang tidak terarah, menjadi sasaran jangka pendek masuk dalam kelompok negara *Upper Middle Income*.

GAMBAR-11. Ketimpangan dan GNI per Kapita (US\$) Indonesia (1990 - 2013)

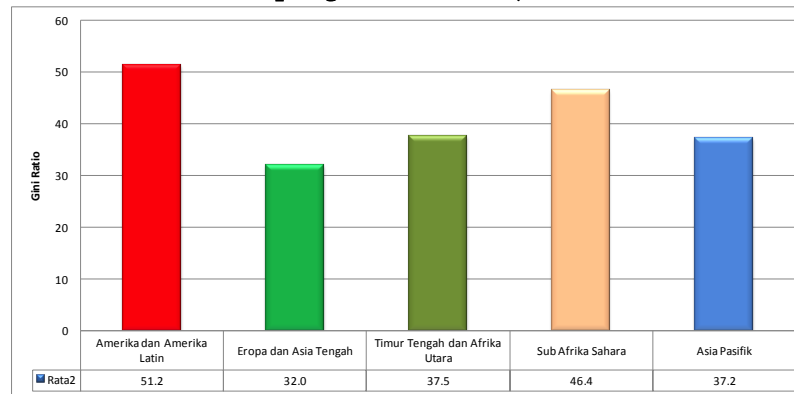


Sumber : WDI

Hasil temuan yang serupa dilaporkan oleh Papanek, Pardede, dan Nazara (2014) bahwa selama hampir 60 tahun, dari tahun 1964/65 hingga 2013, konsumsi untuk orang rata-rata telah meningkat tujuh kali lipat, setelah menghitung peningkatan harga-harga. Dan seluruh kelompok pendapatan memperoleh manfaat yang besar dari pertumbuhan pendapatan dan konsumsi. Akan tetapi, 20 persen penduduk terkaya telah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan 40 persen penduduk termiskin. Setelah menyesuaikan dengan inflasi dan melihat keseluruhan periode dari tahun 1964/65 hingga 2013, konsumsi untuk orang rata-rata di antara mereka yang termasuk 40 persen penduduk termiskin telah meningkat dari sekitar Rp 0,4 juta menjadi Rp. 2,6 juta per tahun, atau sedikit di atas enam kali lipatnya. Mereka yang termasuk 40 persen kelas menengah mengalami pertumbuhan cukup baik: konsumsi mereka meningkat enam kali lipat. Tapi, mereka yang termasuk 20 persen penduduk terkayalah yang paling diuntungkan, dengan konsumsi mereka meningkat sebanyak 7,5 kali lipat.

4.3. Ketimpangan Kawasan

Secara umum, ketimpangan tertinggi adalah kawasan Amerika dan Amerika Latin. Kawasan ini dengan ukuran Gini ratio ketimpangan mencapai lebih dari 50 persen. Kawasan timpang berikutnya adalah kawasan Sub Afrika Sahara, Timur Tengah dan Afrika, Asia Pasifik; dan terakhir kawasan Eropa dan Asia Tengah.

GAMBAR-12. Ketimpangan Kawasan (rata-rata 1990 – 2012)

Sumber : WDI

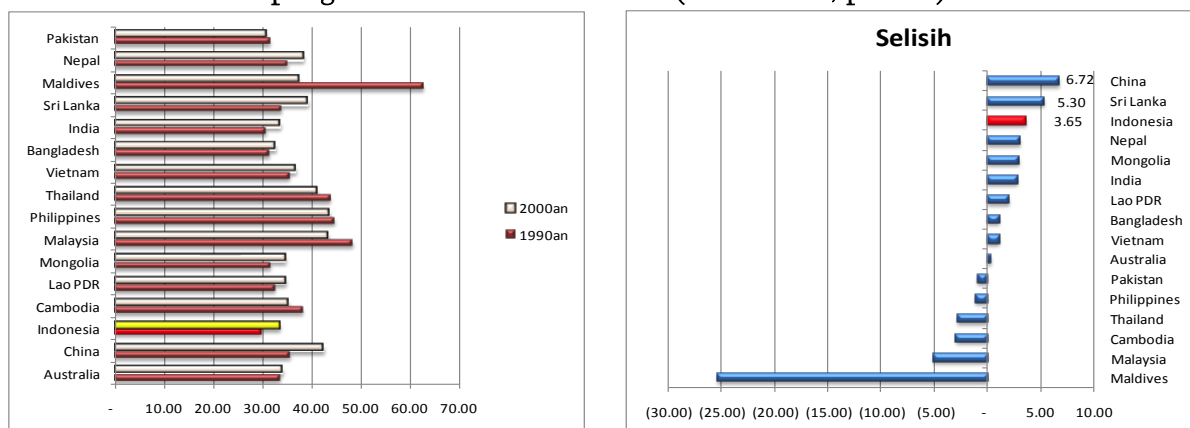
Walaupun ketimpangan di kawasan Asia Pasifik masih termasuk moderat, namun apabila dilihat dari perkembangannya cukup mengkhawatirkan. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian negara-negara kawasan Asia mengalami perkembangan yang pesat. Perekonomian yang maju pesat tersebut telah mampu mengurangi kemiskinan, baik dari sisi jumlah maupun tingkat kemiskinannya. Namun muncul persoalan yaitu naiknya ketimpangan pendapatan.

ADB (2012) melaporkan bahwa pada periode tahun 1990 – 2010, rata-rata tahunan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia mampu mencapai 7,0 persen (GDP dalam PPP 2005). Angka pertumbuhan ini dua kali lipat dibandingkan negara-negara kawasan Amerika Latin yang tumbuh sebesar 3,4 persen. Tingginya angka pertumbuhan di kawasan Asia tersebut dimotori oleh China yang mampu tumbuh dengan rata-rata tahunan sebesar 9,9 persen. Selama periode tersebut, GDP per kapita (dalam PPP 2005) meningkat dari \$ 1633 menjadi \$ 5133. Proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (\$ 1,25 per hari) menurun drastic, dari 53,9 persen pada tahun 1990, menjadi hanya sekitar 21,5 persen pada tahun 2008. Sejumlah 716 juta penduduk telah keluar dari kemiskinan.

Di tengah suksesnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kemiskinan selama 2 dekade tersebut, muncul persoalan baru yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan (atau pengeluaran) di negara-negara Asia banyak yang mengalami peningkatan. Peningkatan ketimpangan ini justru banyak terjadi pada negara-negara yang ekonomi sedang tumbuh pesat seperti China, juga termasuk Indonesia.

Ketimpangan di China selama 2 dekade terakhir mengalami peningkatan 6,7 persen, sementara itu Indonesia mengalami peningkatan 3,6 persen. Dari 9 negara di Asia yang mengalami kenaikan ketimpangan merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kawasan Asia mengalami peningkatan ketimpangan dibanding 2 dekade yang lalu. Meskipun kenaikan ketimpangan Indonesia menduduki peringkat ke-3 tertinggi di Asia, namun apabila dilihat dari angka ketimpangannya, ketimpangan Indonesia tergolong rendah dibanding negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Philipina. Selengkapnya sebagaimana terlihat dalam Gambar-13.

GAMBAR-13. Ketimpangan Kawasan Asia Pasifik (Gini Ratio, persen)[‡]



Sumber : WDI

4.4. Ketimpangan Kelompok Negara

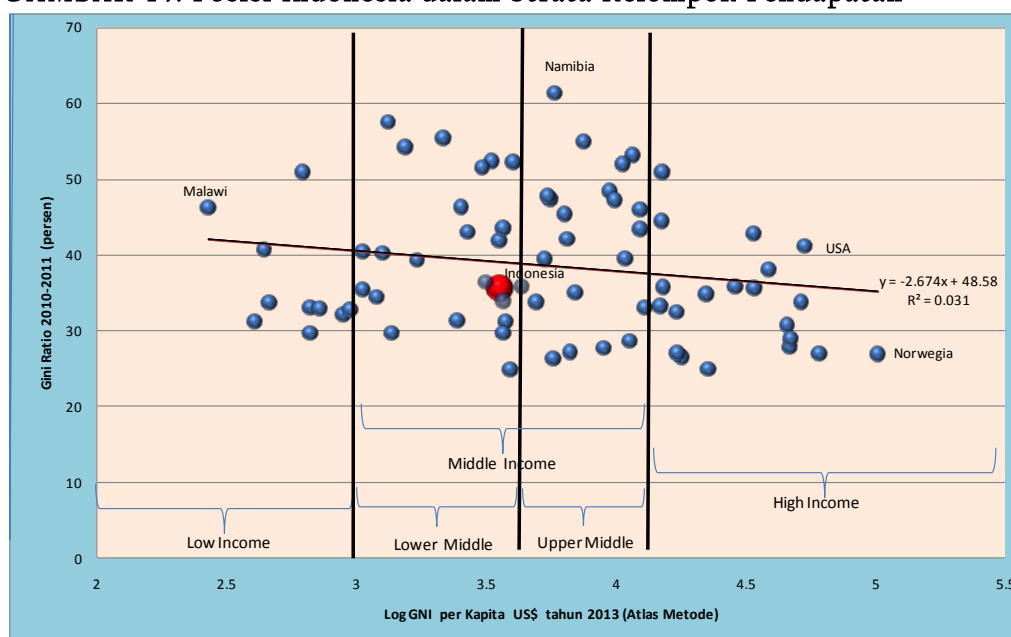
Ravilion (2005) menyatakan sebagaimana model Kuznets, terdapat korelasi positif atau negatif dalam jangka panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi. Ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa. Hubungan tersebut memberikan arti bahwa terjadi evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri).

Dari negara-negara dengan berbagai kelompok pengeluaran, secara umum terdapat korelasi negatif antara ketimpangan dengan GNI per kapita. Semakin tinggi ketimpangan, akan menghambat laju akselerasi GNI per kapita. Ketimpangan pada kelompok *Middle Income*, mempunyai rentang yang sangat lebar, dari 25 persen hingga lebih dari 60 persen. Negara-negara pada kelompok *Middle Income* apabila mempunyai ketimpangan yang tinggi, akan susah naik menjadi kelompok negara *High Income* karena ketimpangan akan menjadi penghambat dan menggerus GNI per kapita.

Seperti Namibia yang merupakan negara dengan ketimpangan tertinggi dimana ketimpangannya mencapai lebih dari 60 persen. Sejak 2008 Namibia telah masuk kelompok *Upper Middle*, namun sampai dengan 2013, GNI per kapita masih sebesar US\$ 5840. Sementara itu, AS walaupun merupakan kelompok negara *High Income*, namun masih mempunyai ketimpangan yang tinggi. Negara *High Income* dengan ketimpangan yang rendah adalah Norwegia.

[‡] Tidak semua negara tersedia data, digunakan angka rata-rata ketimpangan tahun 1990 – 2000 untuk periode 1990an, dan 2001 – 2012 untuk periode 2000an.

GAMBAR-14. Posisi Indonesia dalam Strata Kelompok Pendapatan



Sumber : WDI, diolah

Berbagai masalah struktural menjadi penyebab sulitnya negara-negara kelompok *Middle Income* untuk menjadi negara maju. Seperti disampaikan Itoh (2012) bahwa konsep MIT mengambil konsep dari "jebakan kemiskinan". Konsep ini menyatakan bahwa negara-negara miskin mempunyai berbagai permasalahan struktural yang dianggap sebagai "perangkap" yang mencegah negara tersebut keluar dari kemiskinan. Demikian juga dengan MIT, negara-negara berpenghasilan menengah cenderung memiliki masalah struktural yang membuatnya sangat sulit bagi mereka untuk menjadi negara maju.

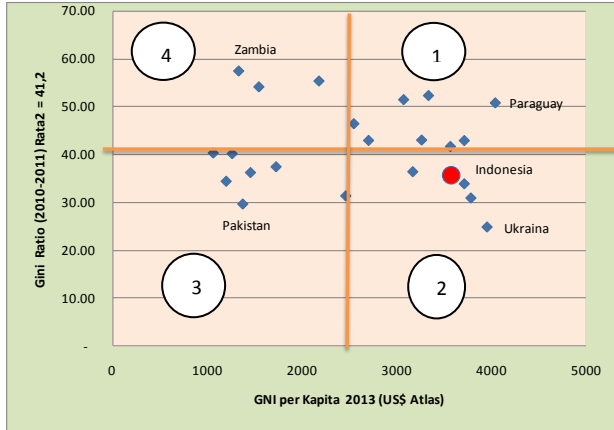
Meskipun mengalami kenaikan, namun ketimpangan Indonesia relatif rendah apabila dibandingkan dengan kelompok negara *Lower Middle Income*. Apabila Indonesia mampu menurunkan ketimpangan, atau setidaknya menahan laju kenaikan ketimpangan, dengan pertumbuhan GNI perkapita sebesar 8 persen diperkirakan tahun 2016 Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara *Upper Middle Income*.

Posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelompok *Lower Middle Income*, relatif cukup baik. Dengan kuadran kartesius, sumbu vertikal ketimpangan dan sumbu horisontal GNI per kapita, Indonesia berada pada kuadran II. Indonesia masuk dalam kriteria negara dengan GNI per kapita tinggi dan ketimpangan yang rendah. Dalam kelompok negara yang tergabung dalam kuadran II, Ukraina merupakan negara yang ketimpangannya rendah (25 persen) dan GNI perkapita (US\$ 3955) hampir masuk kelompok negara *Upper Middle Income*.

Ketimpangan Indonesia dilihat dari masing-masing propinsi memberikan gambaran yang beragam. Secara umum, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi diikuti oleh tingginya ketimpangan. Propinsi Aceh adalah propinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah diikuti oleh ketimpangan yang rendah. Sementara itu, Propinsi Papua dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, tetapi mempunyai ketimpangan yang tertinggi di Indonesia. Kondisi hampir serupa terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi yang didukung Universitas Gajah Mada dengan ikon "Kerakyatan" ini mempunyai ketimpangan diatas rata-rata nasional. Contoh kesenjangan ini dengan mudah dapat ditemui saat membeli makanan di pasar tradisional, dan restoran cepat saji

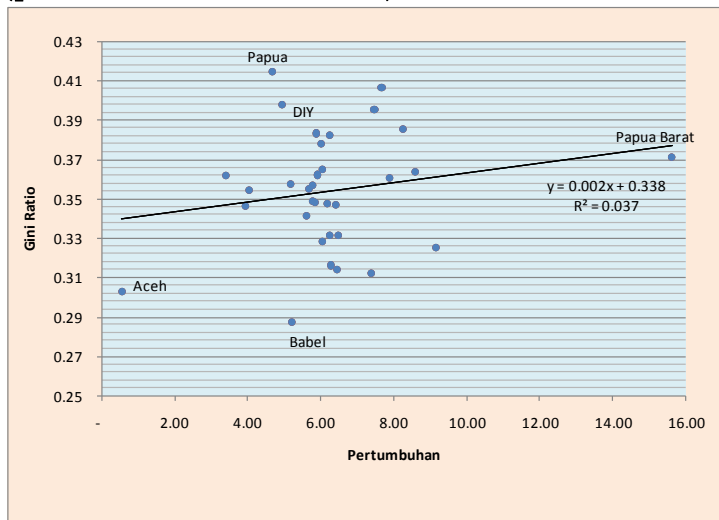
yang menjamur di kota Yogyakarta. Sementara itu, Propinsi Babel mempunyai ketimpangan terendah.

GAMBAR-15. Posisi Indonesia dalam Kelompok *Lower Middle Income*



Sumber : WDI, diolah

GAMBAR-16. Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia (persen, rata-rata 2007-2013)



Sumber : BPS, diolah

4.5. Ketimpangan Kesempatan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain ketimpangan pendapatan, terdapat konsep lain ketimpangan dengan ukuran non-pendapatan. Ketimpangan ketimpangan non-pendapatan, seperti kesenjangan pendidikan dan kesehatan, yang lebih multidimensi dibandingkan dengan ketimpangan dengan ukuran pendapatan. Ketimpangan kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan, pada akhirnya akan menyebabkan kendala dalam masuk pasar kerja, sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Salah satu instrumen penting bagi pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat merancang program belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Misalnya melalui program hibah pemerintah, yang memberikan bantuan

tunai yang terarah pada rumah tangga miskin, untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung. Peningkatan belanja kesehatan dan pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi ketimpangan.

Paesde Barros, et al (dalam ADB, 2012) telah mengembangkan pendekatan ukuran kesetaraan melalui berbagai variabel terhadap layanan akses publik. Dari perhitungan tersebut dapat dihitung perbedaan yang mencerminkan derajat ketimpangan kesempatan (D-index), yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung *Human Opportunity Index* (HOI).⁸

Hasil penghitungan D-indeks dan HOI dari laporan ADB (2012), ketimpangan kesempatan pendidikan dasar Indonesia (D-Index) Indonesia relatif rendah (0,9). Dengan rendahnya ketimpangan, maka diperoleh HOI yang tinggi (93,4). Dengan HOI diatas 90 persen, dapat dikatakan bahwa layanan pendidikan dasar yang diperlukan telah terdistribusi secara adil. Sementara itu, untuk pendidikan menengah masih belum menunjukkan kesetaraan. Nilai HOI untuk layanan pada pendidikan menengah Indonesia sebesar 77,6 persen. Namun demikian, rata-rata negara lain juga mengalami kondisi yang sama. Secara keseluruhan, dari 6 negara yang dilakukan penghitungan, Indonesia menempati peringkat kedua di bawah Sri Lanka untuk ketimpangan kesempatan pendidikan.

TABEL-2. Ketimpangan Kesempatan Pendidikan (%)

Negara	Tahun Survei	Pendidikan Dasar (6 - 11 thn)		Pendidikan Menengah (12 - 17 thn)	
		D-Indek	HOI	D-Indek	HOI
Bhutan	2007	5	78.9	5.8	67.9
Indonesia	2009	0.9	93.4	3.7	77.6
Pakistan	2007-2008	8.7	68.1	15.2	47.6
Philipina	2002	1.8	92.2	4	79.7
Sri Lanka	2009-2010	0.1	99.3	2.2	84.5
Vietnam	2008	1.3	95.1	4.4	78.3

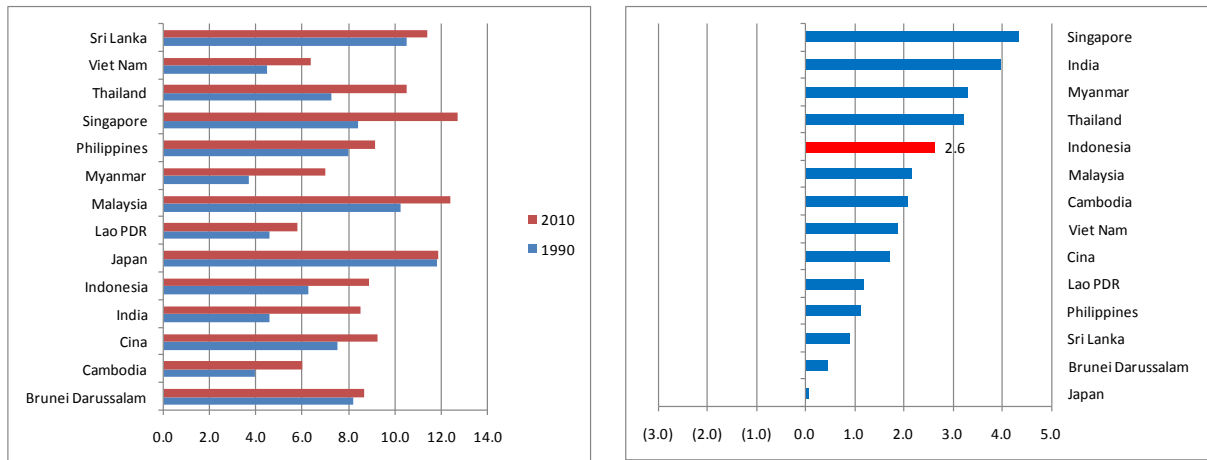
Sumber : ADB (2012)

Perbandingan kesetaraan antar negara di bidang pendidikan pada tahun 1990 dan 2010 dapat dilihat pada Gambar 16. Jepang sejak tahun 1990 telah unggul dalam bidang pendidikan. Namun pada tahun 2010, Singapura dan Malaysia mampu meningkatkan kesetaraan penduduk dibidang pendidikan. Dilihat dari kemajuannya (selisih antara 2 dekade), Indonesia menempati peringkat 5. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk usia 14-25 tahun di Indonesia telah mencapai 8,9 tahun, meningkatkan 2,6 tahun dibanding tahun 1990 yang hanya 6,3 tahun.

Untuk bidang kesehatan, tingkat kematian balita negara yang sudah maju relatif rendah. Laos dan Nepal pada tahun 1990 mengalami tingkat kematian balita yang tinggi. Tahun 2012 tingkat kematian balita tersebut dapat ditekan hingga turun sampai 100 balita per 1000 kelahiran. Indonesia termasuk sukses menekan angka kematian balita, dari 84 anak kematian pada tahun 1990, menjadi 31 anak pada tahun 2012, atau turun 53 kematian anak untuk 1000 kelahiran dalam 2 dekade.

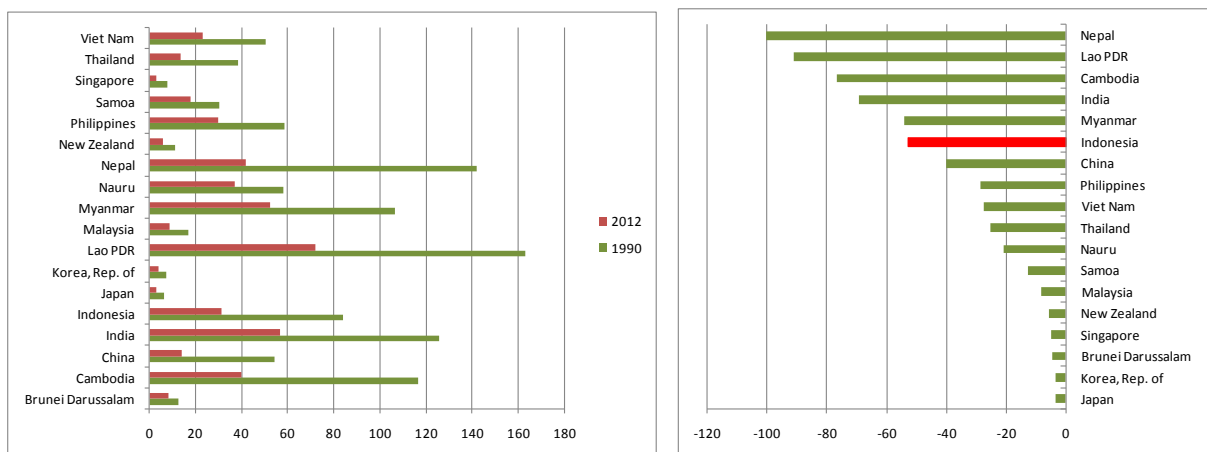
⁸ Human Opportunity Index (HOI) = $\pi (1 - D)$, dimana π = tingkat coverage, D = indek ketimpangan, sehingga (1-D) mencerminkan kesetaraan

GAMBAR-17. Rata-rata Lama Sekolah (usia 14-25 tahun) Tahun 1990 dan 2010



Sumber : ADB, *Framework of Inclusive Growth Indicators (FIGI) Database*, 2014

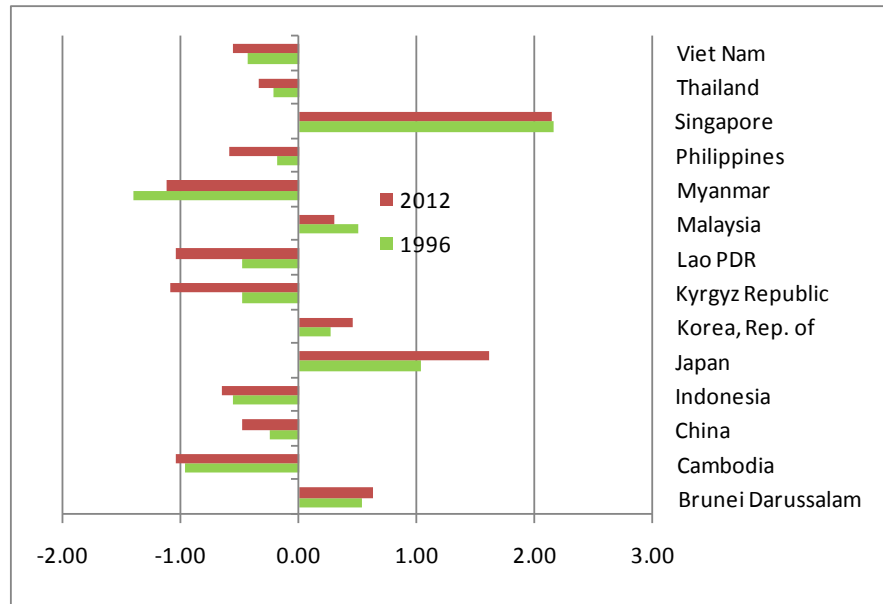
GAMBAR-18. Tingkat Kematian Balita per 1000 kelahiran Tahun 1990 dan 2012



Sumber : ADB, *Framework of Inclusive Growth Indicators (FIGI) Database*, 2014

Dalam *Governance*, salah satu faktor terpenting adalah tingkat korupsi. Tingkat korupsi yang rendah akan memberikan kepastian bahwa masyarakat telah menerima apa yang seharusnya diterimanya dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Dalam hal korupsi, Indonesia belum banyak mengalami perubahan. Skor indeks korupsi Indonesia pada tahun 1996 dengan -0,56, turun menjadi -0,66 pada tahun 2012. Tingkat korupsi Indonesia hampir serupa dengan Vietnam. Sementara itu, Singapura merupakan negara yang terkontrol korupsinya, selama 2 dekade indeks kontrol korupsi tidak jauh berubah, berada pada kisaran 2,2.

GAMBAR-19. Indeks Kontrol Korupsi Tahun 1996 dan 2012**



Sumber : ADB, *Framework of Inclusive Growth Indicators (FIGI) Database*, 2014

4.6. Peran Kebijakan

Peran kebijakan untuk mengurangi ketimpangan jauh lebih kompleks dibanding dengan mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan, langkah yang akan dilakukan pemerintah lebih jelas karena sasaran rumah tangga yang akan dituju dapat teridentifikasi dengan jelas. Sementara itu, ketimpangan menyangkut populasi secara keseluruhan, baik yang kaya maupun yang miskin. Mengurangi ketimpangan tidak dapat diterjemahkan dengan pengendalian pengeluaran kelompok kaya. Namun dilakukan dengan meningkatkan kesetaraan dalam kesempatan serta memperbaiki distribusi pendapatan agar menjadi lebih merata. Beberapa negara di Asia telah melakukan berbagai program untuk mengatasi meningkatnya ketimpangan. Program tersebut bersifat jangka panjang dan diimplementasikan secara nasional. ADB (2012) telah melaporkan upaya-upaya tersebut seperti disajikan dalam Box 1 berikut:

Box 1. Beberapa Program Pengurangan Ketimpangan di Asia	
<ul style="list-style-type: none"> • Di RRC, di mana koefisien Gini pengeluaran per kapita memburuk dari sekitar 32,4 pada tahun 1990 menjadi 43,4 pada bulan 2008, pemerintah mulai membangun masyarakat yang harmonis sebagai tujuan pembangunan dalam Rencana Lima Tahun Kesebelas (2006-2010). dengan penekanan lebih besar pada kualitas-bukan hanya tingkat-pertumbuhan, dan membuat pertumbuhan yang inklusif. • Di India, koefisien Gini memburuk dari 32,5 pada tahun 1993 menjadi 37 pada tahun 2010. Pemerintah India membuat komitmen secara eksplisit untuk pertumbuhan yang inklusif dalam Rencana Lima Tahun Kesebelas (2007-2012). Moto dari rencana pembangunan tersebut adalah "... tidak hanya pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi juga pertumbuhan inklusif, yaitu, suatu proses pertumbuhan yang menghasilkan benefit dengan basis yang luas dan menjamin adanya kesetaraan dalam kesempatan." 	

** Skor indeks kontrol korupsi berada pada -2,5 (sangat buruk) dan 2,5 (sangat baik)

- Rencana Pembangunan 2011-2015 di Malaysia mengadopsi pendekatan pembangunan yang inklusif untuk menjamin pemerataan akses terhadap partisipasi ekonomi di antara semua warga Malaysia, terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin.
- Di Filipina, visi rencana pembangunan jangka menengah 2011-2016 adalah untuk mencapai pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
- Strategi Pengembangan 2012-2016 Thailand didasarkan pada “*sufficiency economy*” dengan filosofi manusia sebagai pusat pembangunan, dengan kesetaraan, keadilan dan ketahanan.

Sumber : ADB, 2012

Lebih lanjut ADB (2012), upaya untuk mengatasi meningkatnya ketimpangan dilakukan melalui kebijakan fiskal yang efisien melalui : (i) Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, terutama bagi rumah tangga miskin; (ii) Skema perlindungan sosial dengan sasaran yang tepat; (iii) Mengurangi atau menghilangkan subsidi harga secara umum (seperti pada BBM) dan mengganti kompensasi pada masyarakat miskin dengan transfer yang selektif/ditargetkan; dan (iv) Perluasan basis pajak dan penguatan administrasi pajak untuk mobilisasi pendapatan yang lebih besar dan lebih adil.

Agar negara berkembang dapat terhindarkan dari jebakan pendapatan kelas menengah, Agenor, dkk (2012) mengusulkan beberapa langkah-langkah: (i) pengembangan infrastruktur canggih dalam bentuk jaringan komunikasi berkecepatan tinggi, (ii) meningkatkan penegakan terkait hak kekayaan intelektual melalui perlindungan hak paten, (iii) reformasi kekakuan pada pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Tri Wibowo (2015) berpendapat bahwa dari sisi kebijakan fiskal, alokasi belanja negara perlu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dalam kesempatan. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dari aspek kesehatan dan pendidikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. PKH merupakan *Conditional Cash Transfer* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dari sisi ketenagakerjaan, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dilakukan melalui : (i) mendorong transformasi struktural untuk membuat lebih banyak pekerjaan yang produktif, dan mempertahankan komposisi sektoral yang seimbang antara manufaktur, jasa, dan pertanian; (ii) mendukung pengembangan UMKM; (iii) memperkuat institusi pasar tenaga kerja; dan (iv) program padat karya sebagai jembatan sementara untuk mengatasi pengangguran. Penduduk yang memperoleh pekerjaan yang layak, akan mampu meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan, yang akan direspon dengan meningkatnya produksi. Siklus ini akan memperkuat pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak perlu didukung SDM yang trampil melalui investasi bidang pendidikan dan kesehatan, serta akses pelayanan publik. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk menciptakan SDM yang trampil dengan didukung kebijakan fiskal yang efisien agar distribusi menjadi merata.

Brodjonegoro (2013) menyampaikan bahwa untuk menuju negara dalam kelompok *Upper Middle Income*, sumber pertumbuhan harus memperhatikan efisiensi, peningkatan

skill tenaga kerja, serta berorientasi pada industri yang memberikan nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal mendorong agar *skill* tenaga kerja Indonesia terus mengalami peningkatan. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang melakukan *capacity building* bagi para pegawainya.

5. KESIMPULAN

Permasalahan ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibanding dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi akan mereduksi pertumbuhan, dan menghambat suatu negara untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT).

Dalam 2 dekade terakhir, ketimpangan di Indonesia telah mengalami peningkatan. Namun kondisi ini juga dialami oleh banyak negara, khususnya yang berada dalam kelompok *Middle Income*. Bahkan dibandingkan dengan negara lain, ketimpangan di Indonesia masih relatif rendah. Oleh karena itu, untuk lepas dari jebakan MIT, kebijakan hendaknya tidak semata-mata terfokus pada peningkatan pendapatan per kapita. Mengerem laju kenaikan ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesetaraan kesempatan merupakan suatu prioritas.

Kebijakan fiskal baik dari sisi perpajakan maupun belanja, memegang peranan penting dalam mengurangi ketimpangan. Dengan ketimpangan pendapatan yang rendah dan meningkatnya kesetaraan baik bidang kesehatan, pendidikan serta akses layanan publik, akan tercipta SDM yang handal dalam memasuki pasar kerja. Kondisi ini merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, yang membuka jalan lebar bagi bangsa Indonesia untuk mampu keluar dari suatu jebakan *Middle Income Trap*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida, 2012, Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir, Bappenas
- Asian Development Bank, 2012, *Asian Development Outlook 2012. Confronting rising inequality in Asia*, Mandaluyong City, Philippines
- Asian Development Bank, 2014, *Asean Development Outlook 2014, Fiscal Policy for Inclusive Growth*, Mandaluyong City, Philippines
- ADB, *Framework of Inclusive Growth Indicators* (FIGI) Database, 2014 (<https://www.adb.org>) diakses tanggal 5 Maret 2016
- Bahagijo Sugeng, dkk. 2014, Walikota New York, Ketimpangan dan Pemilu 2014, Analisis INFID, Nomor 2, Tahun 2014.
- Barros, Ricardo Paes, et al, 2009, *Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Brodjonegoro, Bambang P.S, 2013, *Avoiding the Middle Income Trap Lessons Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainably*, International seminar on "Avoiding the middle-income trap", Bali.
- Haughton J. and Khandker S.R., 2009, *Handbook on poverty and inequality*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Itoh, Motosighe, 2012, NIRA Policy Review No.58, The Middle Income Trap in Asia
- Kanbur Ravi, 2014, *Inequality in Asia and the Pacific: Trends, Drivers, and Policy Implications*, Asian Development Bank
- Kuznets, Simon, 1955, Economic Growth and Income Inequality, *The American Economic Review*, Volume XLV, March 1955

- Papanek G.F., Pardede R., Nazara S, 2014, Pilihan Ekonomi: yang Dihadapi Presiden Baru, Pusat Transformasi Kebijakan Publik, www.transformasi.org (diakses tanggal 12 Nopember 2014)
- Tri Wibowo, 2013, Analisis Pertumbuhan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan Provinsi Sumsel. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 7/No.2/2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Selatan.
- Tri Wibowo, 2015, Mampukah Indonesia Lolos dari *MIT Trap*? Seri Analisis Kebijakan Fiskal, *Dinamika Kebijakan Fiskal : Merespon Ketidakpastian Global*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ravallion, Martin, 2005, A Poverty-Inequality Trade-off? *World Bank Policy Research Working Paper 3579*, April 2005
- World Economic Forum (WEF), *Global Risk 2014, Ninth Edition* is published by the World Economic Forum.
- World Development Indicators (WDI) <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> (diakses 11 Februari 2016)